

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2017/PN.SLK**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**NAMA : ERI ARIANTO, SH., MH.**  
**NIDN : 1015057602**  
**JABATAN : KETUA**  
**NAMA : ANDRI**  
**NIM : 1610004742010**  
**JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
SEPTEMBER 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam  
Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor :  
10/Pdt.G/2017/PN SLK

**Peneliti** :  
**Nama Lengkap** : Eri Arianto, SH., MH.  
**NIDN** : 1015057602  
**Jabatan Fungsional** : Asisten Ahli  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Nomor HP** : 081374882050  
**Alamat surel (e-mail)** : ariantoeri64@gmail.com

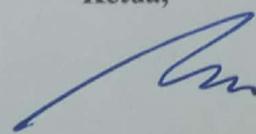
**Anggota Tim**  
**Nama Lengkap** : Andri  
**NIDN** : 161000474201024  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
**Tahun Pelaksanaan** : 2019  
**Sumber Dana** : Mandiri  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 6.000.000,-  
**Biaya Keseluruhan** : Rp. 6.000.000,-

Solok, 17 September 2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)  
NIDN: 1016097402

Ketua,

  
(Eri Arianto, SH., MH.)  
NIDN : 1015057602

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

  
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN: 1019017402

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>3. METODE</b> .....	<b>16</b>
<b>4. JADWAL</b> .....	<b>18</b>
<b>5. DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

## **RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah. UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2).

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic (Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu. Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala

waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah Koto Panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah Kota Solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah Kota Solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah Kota Solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data tersebut akan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan.

Kata kunci maksimal 5 kata
----------------------------

Kata\_kunci\_; Jaksa Pengacara Negara, Sengketa

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## **LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah, setiap tindakan negara ataupun masyarakat pastilah dibatasi dan diatur oleh hukum yang memiliki lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penegak hukum, salah satunya yaitu Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tertinggi dibidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara

dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan tanah. Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi : jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (*subyek hak atas tanah*); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (*obyek hak atas tanah*); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya (A.P. Parlindungan : 15). Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam peta dasar pendaftaran ataupun peta pendaftaran. Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai letak bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidang-bidang tanah yang ada dalam satu wilayah. Selama ini, masalah pertanahan khususnya yang terkait dengan kegiatan

pengukuran dan pemetaan tanah sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang terdaftar sehingga kepastian letak suatu persil atau bidang tanah menjadi tidak terjamin. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada kepastian data mengenai bidang-bidang tanah yang terdaftar pada kantor pertanahan.

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2).

5. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan pemerintah.
6. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - d. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
  - e. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - f. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
7. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
8. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic (Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu.

Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah koto panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah kota solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah kota solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah kota solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah meliputi konflik karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati oleh hak oleh pihak tertentu.

Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjaddi antara Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan <i>state of the art</i> dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.
---

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN**

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan RI adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mangacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan menjadi poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara sebagai jaksa pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI no:INS-002/A/JA/1/2015 tentang perencanaan strategi dan rencana kinerja kejaksaan RI fungsi kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan atas milik Negara jadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelejen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- g. Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam maupun instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relative maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut (Marwan Efendi : 128).

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang saling berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa Undang-Undang, dalam hal ini yaitu Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- a. Bantuan hukum
  - b. Penegkan hukum
  - c. Pertimbangan hukum
  - d. Pelayanan hukum
  - e. Tindakan lainnya
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian uang dan aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Tugas dan wewenang kejaksaan yang

bertindak sebagai jaksa pengacara negara diperjelas dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu dibidang perdata dan tata usaha Negara kejaksanaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dimana undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau jaksa pengacara negara.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA**

### **1. Pengertian sengketa dan penyelesaian sengketa**

Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan anantara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut mudzakkir, persoalan pertanahan dan persengketaan tanah secara massal dapat mempengaruhi upaya membangun dan menguatkan Negara kesatuan republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi dalam keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan tersebut, disebutkan pula bahwa permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau badan pertanahan nasional Republik Indonesia, dipusat maupun daerah berkaitan dengan system perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penangananyang belum sempurna (Benhard Limbong : 29).

Menurut BPN RI secara garis besar konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh badan pertanahan nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam penetapan batas.
3. Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status atas penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi nilai atau pendapat kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.

Sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik Negara ataupun institusi. Tetapi proses penyelesaian sengketa seringkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan karena masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran mengenai penyelesaian konflik seringkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga

sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah (Syaiful Azam : 5). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *Win-Lose Solution* (Nurmaningsih Amriani : 16). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis, yaitu jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi saja harus antri menunggu (Yahya Harahap : 233). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan di kenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan Hukum Acara Perdata. Secara sederhana penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim, namun putusan pengadilan tersebut tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternative lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final.

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

a. Melalui upaya administrasi

Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Melalui gugatan

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu:

- Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usa Negara baik dipusat atau daerah.
- Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada panya atau yang dilimpahkan padanya (Supratman : 22).

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah diselesaikan dengan sederhana,waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan. Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana ketentuan tentang jaksa pengacara negara dalam mewakili negara untuk mempertahankan hak milik negara.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas :

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini di peroleh dengan wawancara yang dilakukan dengan jaksa, pengacara kota solok dalam penyidikan kasus sangketa tanah ulayat yang menjadi objek penelitian.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian, Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian

yang berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Soerjono Soekanto : 5). Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok.

b. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang ada dikepastakaan atau literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilai informasi atau data dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

#### JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6

1	Penyusunan Proposal						
2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. A. P. Parlindungan, 1993, **Komentar Undang-Undang Pokok Agraria**, Bandung : Mandar Maju.
2. Urip Santoso, 2011, **Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah**, Jakarta : Kencana.
3. Marwan Efendi, 2007, **Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
4. Bernhard Limbong, 2012, **Konflik Pertanahan**, Jakarta Selatan : Margaretha Pustaka.
5. Syaiful Azam, 2003, **Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria**, Jakarta, Fakultas Hukum USU.
6. Nurnaningsih Amriani, 2012, **Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Dipengadilan**, Jakarta, Grafindo Persada.
7. Yahya Harahap, 1984, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika
8. Supratman, 2015, **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung**, Jakarta, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata.
9. Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI-Press.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan Republik Indonesia

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun/12 bulan (Rp.)
Pengumpulan Data	250.000,-	12	12	3.000.000,-
Sub Total (Rp.)				
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Paket Data Internet	Pencarian	6	100.000,-	600.000,-
	Referensi			
	Penelitian			
Jumlah				
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun
Tinta Printer	Cetak Proposal	1 Paket	600.000,-	600.000,-
	Dan Laporan			
	Akhir			
Kertas HVS		5 Rim	50.000,-	250.000,-
ATK		1 pak		250.000,-
Jumlah				
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya/tahun/12 bulan (Rp)
Buku	Hard Copy	6	150.000,-	900.000,-
Jumlah				
5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Publikasi				400.000,-
Sub Total (Rp)				400.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (RP)</b>				<b>6.000.000,-</b>



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Arianto, SH., MH.  
NIDN : 1015057602  
Pangkat/Golongan : III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : **"Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomkr 10/Pdt.G/2017/PN SLK**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 17 September 2019

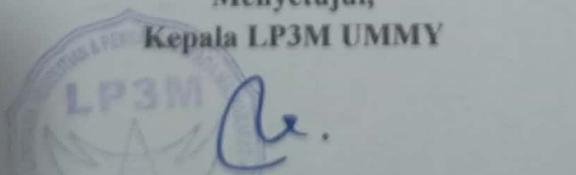
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)  
NIDN: 1016097402

Ketua,

  
(Eri Arianto, SH., MH.)  
NIDN: 1015057602

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

  
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN:1019017402



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas

No. 26.9.c /ST-P/LP3M-UMMY/IX-2019

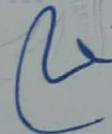
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama	: Eri Arianto, SH., MH.
NIDN	: 1015057602
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 15 Mei 1976
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda / III b
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat	: Kp. Baru Padang pasir No 8b Padang
Nama Anggota	: Andri.
NIM	: 171000474201048
Tempat/Tanggal Lahir	: Solok, 1 November 1993
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat	: Jl. Marahhadin RT/RW 001/005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : **“Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN SLK”** pada Tahun Akademik 2019 / 2020.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 26 September 2019  
Kepala LP3M UMMY



**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.**  
NIDN. 1019017402